

Media Online	Suara Merdeka
Tanggal	6 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Grobogan



Pemkab Ajukan Utang Rp250 M

Halaman 7

■ Untuk Infrastruktur dan Penataan Kota

GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Grobogan berencana mengajukan dana pinjaman sebesar Rp 250 miliar yang akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kota, khususnya dalam upaya mengatasi banjir di wilayah Kota Purwodadi dan sekitarnya.

Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemkab dalam mendukung pembangunan fisik yang mendasar. Terutama pada sistem drainase dan penanganan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan.

"Tahun ini kita siapkan master plan dan Detail Engineering Design (DED). Fokusnya adalah sistem drainase dan permasalahan genangan-genangan yang timbul di wilayah kota," terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Grobogan usai mengikuti pembukaan Musrenbang RPJMD 2025 di Kawasan Wisata Jatipohon, Senin (5/5).

Dikatakannya, masalah banjir di Kota Purwodadi dinilai tidak hanya bersumber dari kondisi lokal, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti Sungai Tuntang dan Sungai Lusi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk penanganan secara menyeluruh. Sementara itu, dana

pinjaman yang direncanakan tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2026, dan pembayarannya dilakukan secara bertahap selama empat tahun, mulai 2027 hingga 2030. "Jika dihitung per tahun, angsurannya sekitar Rp 60 miliar," jelasnya.

Pemerintah menilai bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu opsi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki APBD. Diharapkan, investasi melalui pinjaman ini mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan risiko banjir di pusat kota.

Langkah Strategis

Bupati Grobogan Setyo Hadi menyatakan Pemkab Grobogan menyatakan siap mengambil langkah strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, termasuk membuka peluang

penggunaan pinjaman daerah sebagai salah satu solusi dalam membiayai pembangunan prioritas.

"Dalam menyiasati keterbatasan anggaran, pinjaman daerah dapat menjadi opsi dan strategi pembangunan. Terutama untuk proyek-proyek besar yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat," ujar Bupati.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keberanian untuk menjawab berbagai persoalan klasik pembangunan yang belum tuntas. Seperti kemiskinan yang masih tinggi, angka stunting yang mengkhawatirkan, hingga bencana banjir dan kekeringan yang berulang. Meskipun kondisi makro daerah menunjukkan tren positif, pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, dan IPM membaik. Namun Bupati mengingatkan bahwa tantangan pembangunan masih besar dan memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. (bib-30)